

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

PUSAT PEMERINTAHAN "MANGUPRAJA MANDALA"

Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351 Telp. (0361) 9009265, 9009266 Fax. (0361) 9009267

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BADUNG

NOMOR.436 TAHUN 2017, TANGGAL 28 FEBRUARI 2017

Diberikan Kepada PAUD

Nama

KB. THOMAS AQUINO
Jl. Raya Tuка-Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Telp. 0361.439880

Alamat

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis Pendidikan

Kelompok Bermain (KB)

Rumpun Pendidikan

M.G. Ketut Marsini,S.Pd.Aud/Yayasan Insan Mandiri Denpasar

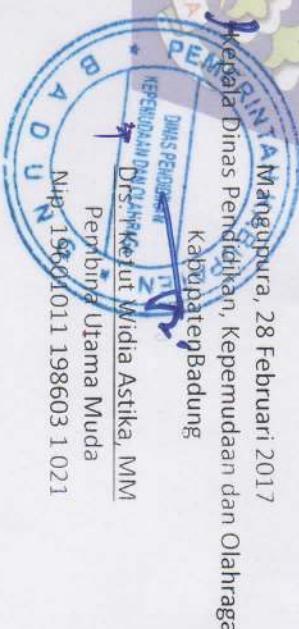
Penyelenggara

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga .Kabupaten Badung,

Berdiri/ijin lama

Nomor : 1655 TAHUN 2009, Tanggal 10 Agustus 2009

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,serta Syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 436 Tahun 2017, maka izin operasional diubah terhitung mulai tanggal 28 Februari 2017, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 436 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari M.G. Ketut Marsini,S.Pd.Aud Penyelenggara Yayasan Insan Mandiri Denpasar Nomor : 03/TK.TA/E.1/2017, Tanggal 7 Februari 2017 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Kuta Utara** Nomor : 421.11/308/VIII/UPT, Tanggal 1 Juli 2016. beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 07/PAUD-PNF/II/2017, hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 terhadap Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung

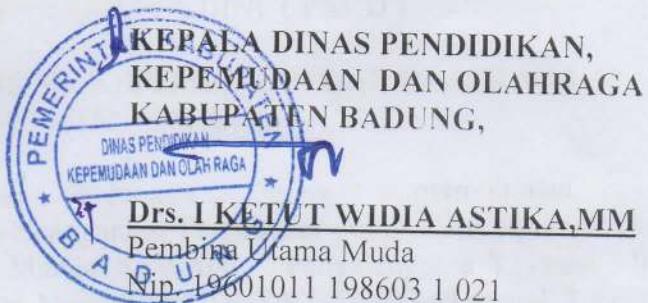
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : **KB. THOMAS AQUINO**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Raya Tuka-Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Telp. 0361.439880.
- Penyelenggara : M.G. Ketut Marsini,S.Pd.Aud/Yayasan Insan Mandiri Denpasar
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **28 Februari 2017**
- KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Nomor : 436 Tahun 2017, Tanggal 28 Februari 2017, maka dengan ini Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Badung Nomor : 1655 TAHUN 2009, Tanggal 10 Agustus 2009 Tentang Ijin Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Februari 2017



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
 3. Bupati Badung di Badung.
 4. Camat Kuta Utara di Kuta Utara
 5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Utara di Kuta Utara
 6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 7. Arsip.